

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 PAGARAN

Puji Rossianna Sinaga^{1*}, Tetti Manullang², Ruslan Juliana Pardosi³

^{1,2,3} Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Tarutung

*Corresponding Author: pujisinaga2908@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of school-based management in improving the quality of education at SMP Negeri 1 Pagaran. The research employs a descriptive approach using qualitative methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the principles of school-based management participation, autonomy, transparency, efficiency, and accountability have been applied across six areas of school management. The implementation of school-based management has been shown to contribute to improving education quality, as reflected in the achievement of national education standards. In curriculum management, teachers and the curriculum team are involved, although participatory and transparent practices still need enhancement. In financial management, funds are managed accountably and efficiently. Student affairs management has involved teachers and students, yet parental involvement remains low and student welfare is not fully addressed in evaluation. Facilities and infrastructure management have been planned and implemented adequately. The management of teaching and educational staff includes evaluation and training practices, although systematic development is still lacking.

Keywords : School-Based Management, Education Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa, karena kualitas pendidikan tidak hanya berpengaruh pada perkembangan individu tetapi juga menentukan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kompetisi ketat dan perkembangan teknologi yang pesat, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, adaptif, dan memiliki daya saing. Mutu pendidikan pada hakikatnya mencakup keterpaduan antara input, proses, dan output. Input meliputi sumber daya manusia, kurikulum, dan sarana prasarana; proses merupakan transformasi melalui pembelajaran dan manajemen sekolah; sementara output tercermin pada kompetensi lulusan dan prestasi sekolah (Nasution, 2022). Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara sinergis agar pendidikan mencapai standar mutu yang diharapkan.

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan secara mandiri dengan prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (Triana et al., 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat serta kemandirian sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan penerapan MBS, sekolah diharapkan mampu lebih inovatif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik maupun tantangan lingkungan.

Penerapan manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan penugasan staf, serta memperbaiki profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah (Siti et al., 2015). Manajemen berbasis sekolah diharapkan dapat memunculkan inovasi dalam implementasi kurikulum, pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan penggunaan sumber belajar. MBS juga berfokus pada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan stakeholder (Nurul Hidayah, 2023). Dengan alasan tersebut, penerapan MBS di setiap sekolah sangat penting, mengingat bahwa sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika dan hubungan di lingkungan mereka sendiri.

Sekolah yang dikatakan bermutu, apabila seluruh sistem manajemen pendidikan yang kompleks pada sekolah tersebut terlaksana dengan baik, dimulai dari manajemen administrasi, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kurikulum dan manajemen humas (Achadah, 2019). Penerapan MBS akan berhasil apabila seluruh komponen sekolah dapat bekerja secara terorganisir dan terkoordinasi dengan baik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan adanya kerja sama yang solid dan rasa tanggung jawab dari setiap pihak terhadap tugas yang diemban (Bernadetha Nadeak, 2022).

Namun, implementasi MBS di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi di SMP Negeri 1 Pagaran menunjukkan bahwa penerapan MBS belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan, minimnya pelatihan guru untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum, serta keterbatasan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan perangkat teknologi informasi. Situasi ini berdampak pada mutu pembelajaran dan kualitas lulusan, sekaligus menandakan adanya kesenjangan antara konsep

ideal MBS dengan implementasi nyata di sekolah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa MBS memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian (Sherawati, et al., 2023) di SMA Negeri 1 Toba Kabupaten Sanggau menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBS telah berjalan sesuai prinsip kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sehingga mendukung mutu pendidikan. Penelitian lain oleh (Handoyo et al., 2021) menegaskan MBS mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan menunjukkan komitmen kepala sekolah dan dukungan komite sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan MBS. Penelitian (Hodin, 2020) juga menyatakan bahwa pelaksanaan MBS yang baik dapat meningkatkan profesionalisme guru. Meskipun demikian, kondisi di SMP Negeri 1 Pagaran berbeda dengan hasil penelitian tersebut karena masih menghadapi kendala dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dianalisis lebih lanjut terkait implementasi MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan pada konteks sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 1 Pagaran, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang implementasi MBS di tingkat sekolah menengah pertama. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi sekolah, komite, dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pagaran. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, bendahara sekolah, ketua layanan khusus, dan komite sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBS. Peneliti berperan sebagai perancang, pelaksana, pengumpul, dan penganalisis data dengan prosedur berupa observasi aktivitas sekolah, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, serta pengumpulan dokumen resmi sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian temuan

dilakukan secara deskriptif untuk menjaga kejelasan, tanpa penggunaan tabel yang berlebihan, namun tetap memuat informasi inti yang diperlukan.

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Temuan

Hasil analisis data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Pagaran telah dilaksanakan pada enam aspek utama, yaitu manajemen kurikulum, keuangan, kesiswaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta layanan khusus.

Dalam aspek manajemen kurikulum, ditemukan bahwa sekolah telah menyusun kurikulum melalui forum rapat kerja awal semester yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan tim kurikulum. Kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Namun, keterlibatan peserta rapat belum sepenuhnya optimal, karena sebagian hanya hadir secara formal tanpa kontribusi nyata, serta masih terdapat keterbatasan dalam akses terhadap dokumen penting seperti RKJM dan RKT.

Pada aspek manajemen keuangan, implementasi MBS ditandai dengan adanya forum perencanaan anggaran yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite, dan orang tua. Transparansi ditunjukkan melalui pelaporan penggunaan dana dalam forum terbuka dan dokumen tertulis. Meski demikian, temuan menunjukkan ketergantungan penuh pada dana BOS serta minimnya sumber pendanaan alternatif, sehingga prinsip kemandirian belum berjalan maksimal. Selain itu, laporan audit keuangan belum dipublikasikan secara luas, sehingga keterbukaan informasi masih terbatas.

Dalam manajemen kesiswaan, sekolah telah menyusun program PPDB, pembinaan akademik, dan ekstrakurikuler dengan melibatkan guru, siswa, dan komite. Hal ini mendukung prinsip partisipasi dan efisiensi, terutama dalam menyesuaikan jumlah peserta didik dengan kapasitas fasilitas. Prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik meningkat, menunjukkan kontribusi positif terhadap mutu pendidikan. Namun, dukungan finansial dari orang tua masih rendah, serta evaluasi kesiswaan masih terfokus pada kedisiplinan dan kehadiran tanpa menyentuh aspek kesejahteraan siswa secara menyeluruh.

Pada aspek manajemen sarana dan prasarana, sekolah telah melakukan pendataan rutin dan menyusun prioritas kebutuhan sesuai kondisi nyata di lapangan. Pengadaan dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap berdasarkan ketersediaan dana. Monitoring internal

juga dilakukan secara berkala. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan strategis masih sangat terbatas, dan informasi penggunaan dana untuk sarana prasarana belum sepenuhnya transparan.

Dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, sekolah telah melaksanakan supervisi rutin oleh kepala sekolah, disertai umpan balik konstruktif bagi guru. Guru juga diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan workshop, menunjukkan upaya pengembangan profesionalisme yang berkesinambungan. Akan tetapi, keterlibatan pihak eksternal, seperti komite sekolah, dalam perencanaan pengembangan guru masih rendah, sehingga prinsip kolaborasi belum sepenuhnya tercapai.

Pada aspek manajemen layanan khusus, terutama perpustakaan dan laboratorium, sekolah telah melakukan perencanaan berbasis kebutuhan nyata dan menjalankan program sesuai prinsip akuntabilitas. Namun, keterbatasan ruang, koleksi buku, dan fasilitas laboratorium menjadi kendala utama dalam pelaksanaan. Meski begitu, layanan khusus ini tetap memberikan kontribusi terhadap mutu pembelajaran, khususnya dalam mendukung standar proses dan standar kompetensi lulusan.

Secara keseluruhan, hasil analisis data menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Pagaran telah menerapkan prinsip-prinsip MBS partisipasi, kemandirian, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pada berbagai aspek manajemen pendidikan. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama terkait keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta kemandirian pendanaan.

Diskusi

Manajemen Kurikulum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Pagaran terkait manajemen kurikulum menunjukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, dan tim kurikulum dalam merancang pembelajaran yang relevan. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan penyesuaian terhadap kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka. Penyusunan RPP dan modul ajar secara mandiri oleh guru mencerminkan prinsip kemandirian, sementara pelibatan orang tua dalam sosialisasi kurikulum menegaskan prinsip partisipasi dan transparansi. Dari sisi efisiensi, pelaksanaan perencanaan dilakukan melalui satu forum terpusat pada awal semester, yaitu rapat kerja, yang membahas berbagai aspek kurikulum sekaligus. Ini menunjukkan adanya upaya penghematan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam pelaksanaan

perencanaan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan belum sepenuhnya optimal. Dalam rapat kerja awal semester, sebagian peserta hanya hadir secara formal tanpa memberikan kontribusi substansial terhadap pengambilan keputusan. Selain itu, ketika diminta dokumen penting seperti rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah, pihak sekolah enggan membagikannya dengan alasan kerahasiaan internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipatif dan transparansi dalam manajemen kurikulum masih perlu ditingkatkan. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala melalui supervisi kepala sekolah dan rapat evaluasi. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran, baik dari sisi isi, proses, maupun hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hasil ini sejalan dengan temuan (Wahyudin et al., 2024) yang menegaskan bahwa perencanaan kurikulum yang partisipatif dan akuntabel sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan MBS di sekolah menengah dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah.

Manajemen Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Pagaran terkait manajemen keuangan di sekolah ini dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perencanaan dilakukan melalui forum terbuka yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan orang tua siswa yang akan membahas anggaran sekolah. Penggunaan dana diumumkan secara terbuka, termasuk melalui papan informasi dan laporan keuangan yang terdokumentasi menunjukkan transparansi keuangan di sekolah tersebut. Efisiensi terlihat dari sekolah berupaya keras menyesuaikan setiap program kerja dengan ketersediaan dana yang terbatas, mengingat seluruh operasional sekolah sangat bergantung pada dana BOS. Sekolah menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan aktual dari masing-masing unit kerja, Evaluasi dilakukan melalui monitoring internal serta audit oleh pihak eksternal seperti dinas pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas sekolah terhadap keuangan sekolah. Namun demikian, berdasarkan temuan lapangan, implementasi prinsip transparansi dan kemandirian belum sepenuhnya optimal.

Peneliti menemukan bahwa sekolah masih sangat bergantung pada dana BOS dan belum memiliki sumber pendanaan alternatif, yang menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan. Dengan demikian, sistem manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan ini diterapkan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui

pencapaian standar nasional pendidikan, khususnya standar pengelolaan. Standar ini menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis serta akuntabel dalam mengelola sumber daya pendidikan. Di SMP Negeri 1 Pagaran, sistem perencanaan anggaran yang partisipatif, pelaporan keuangan yang terdokumentasi, dan mekanisme evaluasi yang rutin telah mencerminkan pemenuhan standar tersebut, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan. Penemuan ini sejalan dengan (Sherawati, et al., 2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah menciptakan kepercayaan masyarakat dan memperkuat akuntabilitas manajemen sekolah dalam kerangka MBS. Dalam praktik transparansi seperti rapat terbuka, pelaporan rutin, dan publikasi penggunaan dapat meningkatkan mutu pendidikan suatu sekolah.

Manajemen Kesiswaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Pagaran terkait manajemen kesiswaan, SMP Negeri 1 Pagaran berhasil menerapkan manajemen kesiswaan berbasis kebutuhan peserta didik. Kegiatan PPDB, pengembangan minat dan bakat, serta program ekstrakurikuler dirancang melalui musyawarah bersama guru, orang tua, dan siswa melalui OSIS. Hal ini mencerminkan penerapan partisipasi dalam perencanaan. Implementasi program dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dengan dukungan komite dan mitra eksternal. Prinsip efisiensi tercermin dari upaya sekolah dalam menyesuaikan jumlah penerimaan peserta didik dengan daya tampung, ketersediaan fasilitas, serta kemampuan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara terfokus dan tidak membebani sumber daya sekolah.

Temuan peneliti juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam hal dukungan keuangan masih rendah, dan kerja sama dengan pihak eksternal belum terdokumentasi serta terstruktur secara optimal. Selain itu, evaluasi kesiswaan masih terbatas pada aspek formal seperti kehadiran dan kedisiplinan, belum menyentuh secara menyeluruh dimensi kesejahteraan siswa. Transparansi ditunjukkan melalui penyampaian laporan kegiatan dan keuangan dalam forum terbuka kepada stakeholder sekolah. Evaluasi berfokus pada kedisiplinan, kehadiran, dan prestasi non-akademik siswa, mencerminkan akuntabilitas. Dengan berjalannya manajemen keuangan dengan baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan baik. Hal ini selaras dengan temuan (Devi et al., 2021) yang menyoroti pentingnya sinergi antara sekolah, siswa, dan masyarakat dalam membentuk budaya sekolah yang positif serta mendukung pertumbuhan karakter peserta didik secara menyeluruh

Manajemen Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Pagaran terkait manajemen sarana dan prasarana, SMP Negeri 1 Pagaran berhasil menerapkan Pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik yang dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan dan penyusunan prioritas berbasis kondisi nyata sekolah serta adanya partisipasi masyarakat perencanaan. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan fasilitas. Perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi, karena setiap keputusan pengadaan dan perbaikan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal dan penghindaran pemborosan anggaran.

Peneliti menemukan bahwa keterlibatan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Selain itu, informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana sarana prasarana belum sepenuhnya dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga prinsip transparansi belum berjalan maksimal. Evaluasi kondisi dan penggunaan fasilitas dilakukan secara rutin setiap akhir semester. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, karena fasilitas yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar, serta mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Hal ini menguatkan temuan (Hodin, 2020) bahwa keberhasilan manajemen berbasis sekolah juga bergantung pada kemampuan sekolah dalam merencanakan secara mandiri dan mengelola aset fisik secara efisien dengan melibatkan partisipasi seluruh pihak

Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Pagaran terkait manajemen tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Pagaran melibatkan analisis kebutuhan sumber daya berdasarkan jumlah, kompetensi, dan distribusi tugas. Sekolah mendorong peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan, workshop, dan mentoring internal, sejalan dengan prinsip pengembangan berkelanjutan (continuous development). Guru dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan dan pembagian tugas, menunjukkan partisipasi dan transparansi.

Peneliti menemukan bahwa keterlibatan pihak eksternal seperti komite sekolah dalam tahap awal perencanaan masih terbatas, sehingga prinsip kolaborasi yang luas belum sepenuhnya terwujud. Sekolah berupaya memaksimalkan kinerja dan potensi guru yang

tersedia agar tetap relevan dengan kebutuhan pembelajaran, tanpa menimbulkan pemborosan anggaran maupun penumpukan beban kerja sesuai dengan prinsip efisiensi. Evaluasi dilakukan melalui supervisi pembelajaran yang berorientasi pada pembinaan, bukan hanya pengawasan. Semua upaya tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, karena tenaga pendidik yang profesional dan didukung oleh sistem manajemen yang akuntabel akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Hal ini selaras dengan penelitian (Wahyudin et al., 2024) yang menegaskan bahwa pengembangan profesionalisme guru merupakan pilar utama peningkatan mutu di sekolah berbasis MBS yang dilakukan secara partisipatif dan akuntabel

Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus seperti perpustakaan dan laboratorium menunjukkan bahwa sekolah melakukan perencanaan berbasis kebutuhan nyata. Pelaksanaan dan penggunaan layanan dilakukan secara terbuka, dengan pelibatan guru dan staf administrasi. Evaluasi mencakup pengukuran efektivitas layanan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, memperlihatkan prinsip akuntabilitas. Prinsip efisiensi diterapkan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, baik dalam pemanfaatan ruang, tenaga, maupun anggaran, agar layanan tetap berjalan tanpa pemborosan. Namun, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas perpustakaan dan laboratorium masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program secara optimal. Meskipun perencanaan telah disusun dengan baik, keterbatasan sarana menyebabkan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Penerapan manajemen layanan khusus yang baik ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan, karena keberadaan perpustakaan yang aktif dan laboratorium yang fungsional memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih komprehensif, eksploratif, dan mendalam. Layanan ini tidak hanya memperkaya sumber belajar, tetapi juga mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek.

Pentingnya layanan pendukung yang dirancang secara inovatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sherawati, Wulandari, Wahyudi, dan Usman, 2023) yang menekankan pentingnya inovasi dan partisipasi dalam mendesain layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang berkualitas

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMP Negeri 1 Pagaran telah dilaksanakan secara menyeluruh pada enam aspek utama, yakni manajemen kurikulum, keuangan, kesiswaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta layanan khusus. Hal ini selaras dengan tujuan yang dirumuskan dalam pendahuluan, yaitu untuk menelaah bagaimana penerapan prinsip-prinsip MBS partisipasi, kemandirian, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun setiap aspek manajemen telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya keterlibatan aktif masyarakat, keterbatasan dalam kemandirian pendanaan, serta keterbukaan informasi yang belum optimal.

Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini tidak hanya menegaskan bahwa MBS telah menjadi instrumen penting dalam penguatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pagaran, tetapi juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, diversifikasi sumber pendanaan, serta penguatan transparansi publik dalam setiap aspek pengelolaan sekolah. Temuan ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung MBS dan pengembangan model pendanaan alternatif yang lebih berkelanjutan guna memperkuat otonomi sekolah.

UCAPAN SYUKUR

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pagaran beserta jajaran guru dan staf yang telah memberikan izin, dukungan, serta data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, penghargaan diberikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan moral selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadah, A. (2019). Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs): Konsep Dasar. *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4(2), 2019–2077.
- Bernadetha Nadeak. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung). Widina Bhakti Persada.
- Devi, A. D., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis

- Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas di Sekolah Menengah Pertama. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(3), 963–971.
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 321. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855>
- Hodin. (2020). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri 02 Purworejo. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(1), 51–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i1.211>
- Nasution, W. R. (2022). Konsepsi Manajemen, Manajemen mutu dan Manajemen Mutu Pendidikan. *Journal Of Education*, 2(1), 26–34.
- Nurul Hidayah, S. (2023). *Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Manajemen BK Upaya Meningkatkan Mutu Belajar Siswa DI SMA N 1 Tanjung Tiram*. 12(1), 1–23.
- Sherawati, Wulandari, Wahyudi, dan Usman, R. (2023). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 1 Toba Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12, 9. <https://doi.org/10.26418/jppk.v12i1.61418>
- Siti, A., Murniati, A., & Nasir, U. (2015). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada MTsN Kota Lhokseumawe. *Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2), 1–11. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2536>
- Triana, N. M., Nasution, I., & Nasution, T. (2022). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA Abdi Utama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(01), 214–219.
- Wahyudin, H., Radiana, U., & Wicaksono, L. (2024). Manajemen Pendidikan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Manajemen Pendidikan*, 19(2), 224–238.